



## **ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI BENGKULU**

**Barika · Antoni Sitorus**

**Abstract.** *In the context of regional autonomy, the source of regional revenue consists of transfers from the central government and regional own-source revenues (PAD). Many studies have identified the Flypaper effect on these two sources of revenue, with local governments generally responding to higher spending on revenues from transfers compared to sources from PAD. This study aims to determine whether the flypaper effect phenomenon is also found in regional government expenditure in Bengkulu Province. The study uses panel data, consisting of 10 districts / cities in Bengkulu province in the period 2011-2016, using the Fix Effect Model analysis technique. The results of the study found that there has been a Flypaper Effect phenomenon in regional spending in Bengkulu Province. It shows that the coefficient value of general allocation funds is greater than the coefficient value of local revenue.*

**Keywords :** *Flypaper Effect, Government Expenditure, Local Revenue, Transfer Revenue*

---

©2019 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

### **PENDAHULUAN**

Berlakunya kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah membawa banyak pembaharuan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui sistem desentralisasi ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Nabillah, 2014 ; Pramuka, 2010).

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, sistem desentralisasi memberikan sumber-sumber penerimaan kepada pemerintah daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun yang berasal dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana

Barika(✉)

Universitas Bengkulu

Email : [barika\\_ramli@yahoo.co.id](mailto:barika_ramli@yahoo.co.id)

Antoni Sitorus

Universitas Bengkulu

Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Mengurangi dan atau menghilangkan kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh provinsi merupakan tujuan dari transfer pemerintah pusat ke daerah.

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 nilai PAD sebesar Rp. 138.284.180.000 meningkat menjadi Rp. 441.710.491.000 pada tahun 2015. Adapun jumlah dan kontribusi dana transfer dan PAD dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah dan Kontribusi Dana Transfer dan PAD Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2015.**

| Tahun | Jumlah dan Kontribusi Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah |       | Jumlah dan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah |       |
|-------|--|-------|--|-------|
| 2011  | 4,433,491,977,206.00   | 75.26 | 579,858,395,488.61                                   | 9.84  |
| 2012  | 5,274,824,886,758.00   | 78.94 | 671,981,029,190.64                                   | 10.06 |
| 2013  | 5,901,964,101,421.00   | 78.80 | 765,624,830,625.23                                   | 10.22 |
| 2014  | 6,578,563,143,813.25   | 75.27 | 1,045,447,211,110.05                                 | 11.96 |
| 2015  | 7,281,932,623,508.00   | 73.00 | 1,119,476,505,513.88                                 | 11.22 |
| 2016  | 8,702,442,504,724.00   | 75.99 | 1,242,986,648,719.35                                 | 10.85 |

Sumber : DJPK kemenkeu, data diolah

Tabel 1. menunjukkan bahwa penerimaan daerah provinsi Bengkulu yang bersumber dari PAD dan transfer meningkat setiap tahunnya. Sumbangan terbesar berasal dari dana transfer. Secara rata-rata 75 persen penerimaan daerah berasal dari dana transfer. Meskipun demikian, pertumbuhan DAU provinsi Bengkulu pada kurun waktu tahun 2013-2016 dibawah pertumbuhan PAD. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis *Flypaper Effect* pada pengeluaran Pemerintah di Provinsi Bengkulu tahun 2011-2016”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pengaruh sebenarnya DAU dan PAD terhadap Belanja daerah pada provinsi Bengkulu?
2. Apakah terjadi *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah pada provinsi Bengkulu?

## LANDASAN TEORI

### *Flypaper Effect*

Pada dasarnya *Flypaper Effect* atau juga dikenal sebagai efek kertas layang merupakan suatu keadaan yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (Grants), dalam konteks ini merujuk pada



Dana Alokasi Umum daripada menggunakan kemampuan sendiri, yang merujuk pada sumber penerimaan PAD (Maimunah, 2006). Sejalan dengan pengertian tersebut, Dougan dan Kenyon (dalam Ndadari, 2008) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* merujuk pada suatu kondisi yang tidak biasa dimana ada kecenderungan jika penerimaan yang berasal dari dana transfer akan dapat menyebabkan belanja publik yang besar dibandingkan dengan penambahan sumber penerimaan yang berasal dari masyarakat dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

*Flypaper Effect* dapat diartikan sebagai respon yang tidak simetri atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat. Afrizawati (2012) menyatakan bahwa dana transfer akan diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (*grants*) yang cenderung meningkat. Adanya kondisi terjadi *Flypaper Effect* pada alokasi pengeluaran, maka pemerintah berharap dapat seminimum mungkin memperkecil respon yang berlebihan pada belanja daerah.

Kuncoro (2007) menyatakan bahwa “Dalam khasanah ekonomi, *Flypaper Effect* dapat dikelompokkan menjadi dua aliran pemikiran, yakni model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). *Flypaper Effect* dipandang dari sudut pandang birokrat merupakan model birokratik, sedangkan model ilusi fiskal kajiannya berdasarkan pada sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya”. Pemikiran birokratik memandang bahwa posisi birokrat lebih kuat dalam pengambilan keputusan publik dan berusaha untuk memaksimalkan anggaran sebagai proksi kekuasaannya. Selain itu Model birokratik juga menegaskan *flypaper effect* sebagai akibat dari perilaku birokrat yang leluasa untuk membelanjakan transfer daripada menaikkan pajak.

Tresch (2005) menyatakan untuk mengukur terjadinya *Flypaper Effect* dapat diukur dengan cara membandingkan koefisien DAU dan koefisien PAD. Jika koefisien DAU > koefisien PAD, maka terjadi *Flypaper Effect*, atau dapat difungsikan jika  $b_1 > b_2$ , maka terjadi *Flypaper Effect*.

### ***Pendapatan Asli Daerah***

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Halim (2007) mengelompokkan Pendapatan Asli Daerah menjadi empat jenis pendapatan yakni :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

### ***Dana Alokasi Umum***

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DAU merupakan salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. alokasi besarnya DAU didasarkan pada persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Untuk daerah-daerah besarnya DAU ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan urusan



pemerintahan dimana formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang.

### ***Pengeluaran Daerah/Belanja Daerah***

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa “Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Sedangkan pengeluaran Daerah adalah merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Pengelompokan belanja menurut Permendagri No. 21 tahun 2011 ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

## **METODOLOGI**

### ***Jenis penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa penelitian dengan metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan Nazir (2005) bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

### ***Jenis dan sumber data***

Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena *flypaper effect* di provinsi Bengkulu. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Riduan (2004) menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang tidak dihimpun secara langsung, tetapi diperoleh dari pihak kedua. Data-data yang akan diperlukan meliputi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya. Selain itu sumber data juga diperoleh dari akses melalui internet dengan situs antara lain; [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), dan [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). Jenis data adalah yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* (antar daerah) dan data *time series* (runtun waktu). Yaitu terdiri atas 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2011-2016.

### ***Definisi Operasional***

1. Belanja Daerah Merupakan jumlah belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah pada tahun 2011 sampai tahun 2016. Yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Diukur dalam satuan Ln Belanja Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagian Laba Usaha Milik Daerah (BLUMD) dan pendapatan lain yang sah (PLL), tahun 2011-2016 dalam satuan Ln PAD.
3. Dana Alokasi Umum merupakan Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana



perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD tahun 2011-2016 dalam satuan Ln DAU.

**Teknik analisis**

1. Regresi Data Panel. Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan tehnik analisis kuantitatif yaitu analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis panel data (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 9.0. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara *time-series* data dengan *cross-section* data.
2. Untuk melihat terjadinya kondisi *Flypaper Effect* di provinsi Bengkulu maka akan dibandingkan koefisien regresi masing-masing variabel yaitu koefisien variabel Dana Alokasi Umum dan koefisien variable Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Apabila nilai koefisien Dana Alokasi Umum lebih kecil dibandingkan nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah maka dapat disimpulkan tidak terjadi *Flypaper Effect* di provinsi Bengkulu.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi data**

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi Penerimaan Asli Daerah, data Dana Alokasi Umum, dan data Belanja Daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu.

1. Realisasi Penerimaan Asli Daerah

Data realisasi penerimaan asli daerah terdiri dari data kabupaten/kota di provinsi Bengkulu selama 5 tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

**Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2016**

| Kabupaten/Kota        | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016            |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kab. Bengkulu Selatan | 14,758,401,175 | 18,911,016,578 | 25,454,023,289 | 40,100,659,787 | 51,660,279,141 | 58,748,467,982  |
| Kab. Bengkulu Utara   | 19,099,215,921 | 25,311,027,532 | 30,114,222,171 | 51,659,109,966 | 52,346,689,051 | 63,650,964,000  |
| Kab. Rejang Lebong    | 19,851,004,770 | 47,171,759,046 | 40,457,341,347 | 57,714,029,248 | 58,706,435,942 | 71,294,600,225  |
| Kota Bengkulu         | 39,318,037,210 | 41,709,552,052 | 55,979,830,260 | 81,754,841,665 | 96,768,413,116 | 110,831,838,872 |
| Kab. Kaur             | 6,810,591,506  | 7,781,828,802  | 10,346,896,876 | 19,493,428,862 | 24,214,346,967 | 34,557,677,829  |
| Kab. Seluma           | 5,535,533,741  | 10,721,155,675 | 16,756,639,780 | 25,607,988,162 | 27,459,318,276 | 28,643,738,976  |
| Kab. Mukomuko         | 9,341,068,799  | 9,217,503,959  | 20,184,371,741 | 34,892,901,397 | 42,740,290,553 | 62,046,588,953  |
| Kab. Lebong           | 7,790,174,032  | 7,749,144,879  | 12,898,746,197 | 17,498,314,380 | 17,201,350,189 | 22,994,746,198  |
| Kab. Kepahiang        | 11,989,653,357 | 13,896,281,348 | 19,467,833,938 | 28,183,721,899 | 28,018,903,714 | 31,455,382,716  |
| Kab. Bengkulu Tengah  | 4,444,531,263  | 5,743,484,324  | 8,756,990,097  | 16,477,747,495 | 19,060,095,337 | 27,205,908,898  |

Sumber : DJPK Kemenkeu, data diolah 2018.



Dari tahun 2011 hingga tahun 2016 nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, kota Bengkulu merupakan daerah yang memiliki PAD tertinggi yakni Rp.110.831.838.872,- daerah yang memiliki PAD tertinggi kedua adalah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.71.294.600.225,-. Daerah yang memiliki PAD terendah adalah Kabupaten Lebong yakni sebesar Rp.22.994.746.198,-. Adapun daerah yang mengalami pertumbuhan PAD paling tinggi di tahun 2016 adalah kabupaten Bengkulu tengah dengan kenaikan sebesar 42,73 persen dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya.

2. Realisasi Dana Alokasi Umum.

Adapun Data jumlah dana alokasi umum meliputi data realisasi dana alokasi umum kabupaten/kota di provinsi Bengkulu tahun 2012-2016.

**Tabel 3. Jumlah dana alokasi umum di provinsi Bengkulu**

| Kabupaten/Kota        | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kab. Bengkulu Selatan | 382,925,770,693 | 464,456,933,976 | 512,273,028,444 | 562,436,050,693 | 602,061,491,852 | 800,333,973,913 |
| Kab. Bengkulu Utara   | 468,711,496,196 | 539,951,961,367 | 575,281,908,573 | 636,374,181,923 | 778,164,938,536 | 883,197,162,541 |
| Kab. Rejang Lebong    | 439,972,091,228 | 524,063,886,149 | 571,106,867,672 | 611,892,330,400 | 665,203,694,156 | 743,057,291,113 |
| Kota Bengkulu         | 456,091,222,821 | 546,754,625,424 | 613,982,188,259 | 675,684,047,110 | 669,683,726,556 | 796,075,093,078 |
| Kab. Kaur             | 309,867,703,583 | 367,406,425,555 | 411,348,448,514 | 466,720,515,689 | 602,451,460,903 | 669,635,001,395 |
| Kab. Seluma           | 349,901,298,794 | 427,979,674,578 | 481,536,206,928 | 537,707,202,083 | 596,046,976,324 | 697,254,471,692 |
| Kab. Mukomuko         | 346,177,154,037 | 409,945,781,164 | 495,653,624,272 | 550,643,683,482 | 604,349,439,587 | 669,569,579,114 |
| Kab. Lebong           | 305,886,640,568 | 381,046,244,511 | 410,865,267,576 | 458,289,932,995 | 500,438,751,103 | 645,125,486,000 |
| Kab. Kepahiang        | 323,114,031,280 | 372,285,457,025 | 427,971,426,548 | 483,755,668,579 | 502,806,364,856 | 566,217,094,247 |
| Kab. Bengkulu Tengah  | 338,580,243,308 | 357,937,224,257 | 424,597,180,652 | 490,476,855,342 | 551,740,414,427 | 615,515,221,788 |

Sumber : DJPK Kemenkeu, data diolah 2018

3. Realisasi Belanja Daerah.

Data realisasi belanja daerah terdiri dari data kabupaten/kota di provinsi Bengkulu tahun 2012-2016.

**Tabel 4. Belanja Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2012 -2016.**

| Kabupaten/Kota        | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            | 2015              | 2016              |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kab. Bengkulu Selatan | 473,978,187,300 | 539,683,242,575 | 585,482,104,977 | 696,502,627,008 | 827,524,682,298   | 1,038,254,839,683 |
| Kab. Bengkulu Utara   | 591,123,231,934 | 685,187,145,395 | 691,488,764,302 | 749,143,894,741 | 989,349,003,888   | 1,229,795,556,540 |
| Kab. Rejang Lebong    | 549,491,742,575 | 619,437,289,544 | 650,613,632,939 | 760,936,110,049 | 851,591,747,483   | 978,689,804,586   |
| Kota Bengkulu         | 595,218,619,343 | 642,273,933,972 | 756,926,896,974 | 882,511,866,501 | 1,033,395,681,570 | 1,036,720,514,211 |
| Kab. Kaur             | 355,460,934,019 | 416,397,338,772 | 467,213,658,063 | 534,128,440,826 | 727,677,677,244   | 891,363,105,812   |
| Kab. Seluma           | 436,143,807,440 | 411,675,204,275 | 548,165,592,102 | 679,385,257,491 | 754,429,160,650   | 900,417,696,803   |
| Kab. Mukomuko         | 371,383,295,192 | 458,136,740,893 | 577,069,356,337 | 609,328,887,238 | 702,340,459,454   | 819,713,444,817   |
| Kab. Lebong           | 362,944,155,427 | 391,834,087,745 | 446,986,476,031 | 529,956,532,215 | 584,258,916,710   | 761,601,158,358   |



| Kabupaten/Kota       | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kab. Kepahiang       | 398,351,739,722 | 398,435,261,413 | 462,747,720,903 | 553,600,632,934 | 689,078,210,097 | 672,070,332,827 |
| Kab. Bengkulu Tengah | 412,594,151,673 | 407,528,362,749 | 478,889,717,034 | 538,114,488,822 | 657,797,982,268 | 822,529,593,932 |

Sumber : DJPK Kemenkeu, data diolah

### Analisis Data

#### 1. Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja daerah di provinsi Bengkulu tahun 2011-2016. Adapun hasil regresi data panel dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Data Panel**

**Dependent Variable: LNGOVEXP**

**Method: Panel EGLS (Cross-Section Random Effects)**

| Variable            | Coefficient | Std. Error         | t-Statistic | Prob.  |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C                   | -2.442      | 1.512506           | -1.614766   | 0.1119 |
| LNPAD               | 0.044       | 0.024935           | 1.795166    | 0.0779 |
| LND AU              | 1.058       | 0.074886           | 14.12527    | 0.0000 |
| Weighted Statistics |             |                    |             |        |
| R-squared           | 0.956032    | Mean dependent var | 27.14512    |        |
| F-statistic         | 619.7012    | Durbin-Watson stat | 1.927106    |        |
| Prob(F-statistic)   | 0.000000    |                    |             |        |

Berdasarkan hasil regresi data panel pada Tabel 9, maka dapat dinyatakan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Belanja Daerah} = -2,442344 + 0,044763\text{PAD} + 1,057780\text{DAU} + e \dots(1)$$

Hasil konstanta pada persamaan 1 bernilai -2,44 yang artinya jika Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki nilai 0 (Nol) maka Belanja Daerah akan berkurang sebesar 2,44 persen.

#### 2. Pengujian Hipotesis

##### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Nilai koefisien Determinasi adalah 0,956 berarti bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dalam menjelaskan Belanja Daerah di provinsi Bengkulu adalah sebesar 96 persen sedangkan sisanya 0,04 dijelaskan oleh variabel lain.



b. Hasil Perhitungan Uji F (F-test)

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independent secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent. Dilihat dari nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 berarti secara keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Alokasi Umum secara bersama-sama/keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah provinsi Bengkulu. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang signifikan.

c. Hasil Perhitungan Uji t (t-test)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Pengujian hipotesis secara individu dengan menggunakan uji-t dengan uji 1 arah dengan  $\alpha = 10\%$  atau  $\alpha = 0,1$  dilakukan untuk dapat melihat masing-masing pengaruh dari variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) sebesar 1,795 dengan probabilitas sebesar 0,07. Artinya probabilitas yang diperoleh lebih kecil daripada Alpha ( $0,07 < 0,1$ ), sehingga kita dapat menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

Nilai t hitung untuk variabel pendidikan ( $X_2$ ) sebesar 14,125 dengan probabilitas sebesar 0,000. Artinya probabilitas yang diperoleh lebih kecil daripada Alpha ( $0,00 < 0,1$ ), sehingga kita dapat menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

3. Analisis *Flypaper Effect*

Untuk menentukan telah terjadi fenomena *Flypaper Effect*, maka efek Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di provinsi Bengkulu akan dibandingkan dengan efek Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di provinsi Bengkulu. Adapun syarat terjadinya *Flypaper Effect* (Wulansari, 2015) adalah:

- Apabila nilai koefisien Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di provinsi Bengkulu lebih besar dari pada nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di provinsi Bengkulu dan kedua-duanya sama-sama signifikan.
- Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di provinsi Bengkulu tidak signifikan.

Berdasarkan tabel 5 dan hasil uji parsial (Uji t) diketahui bahwa nilai koefisien Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di provinsi Bengkulu lebih besar dari pada nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di provinsi Bengkulu dan kedua-duanya sama-sama signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa di kabupaten/kota di provinsi Bengkulu telah terjadi fenomena *Flypaper Effect*.

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara keseluruhan (uji F) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Bengkulu. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan yang positif terhadap Belanja





Daerah yang artinya jika Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum meningkat maka Belanja Daerah akan meningkat.

Hasil estimasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah di provinsi Bengkulu berpengaruh positif signifikan. Hal ini menandakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Belanja Daerah juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nabilah (2014), Pramuka (2010) dan Ekawarna (2017). Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli daerah sebesar 0,044 artinya jika Variabel Pendapatan Asli daerah meningkat 1 persen maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,044 persen. Koefisien Pendapatan Asli Daerah yang rendah menandakan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang masih rendah. Pada tahun 2016 kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 10,85 persen. Kontribusi ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni 11,22 persen.

Adapun nilai koefisien variabel Dana Alokasi umum sebesar 1,058 yang artinya jika terjadi peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 1 persen maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 1,058 persen. Koefisien dana alokasi umum yang positif menandakan bahwa ada hubungan yang positif antara dana lokasi umum terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil uji  $t$  diketahui nilai  $t$  hitung sebesar 14.12527 dan signifikansi 0,0000 dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pradata (2015), Suyanto (2014), Pramuka (2010).

Hasil estimasi antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah, menunjukkan hasil yang sama-sama positif secara signifikan. Nilai koefisien dana alokasi umum yang lebih besar dibandingkan nilai koefisien pendapatan asli daerah menandakan adanya fenomena *Flypaper Effect* pada belanja daerah di provinsi Bengkulu.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum yang bersifat blok *grant* menyebabkan daerah untuk melakukan pengeluaran berupa belanja daerah yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah cenderung bersifat boros dalam membelanjakan penerimaan daerah jika porsi dana alokasi umum besar. Di provinsi Bengkulu, daerah yang mendapatkan dana alokasi umum terbesar pada tahun 2016 adalah kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp. 883,197,162,541,- dan daerah yang mendapatkan dana alokasi umum terendah adalah kabupaten Kepahiang dengan nilai dana alokasi umum sebesar Rp. 566.217.094.247,-

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dalam menjelaskan Belanja Daerah di provinsi Bengkulu adalah sebesar 96 persen sedangkan sisanya 0,04 dijelaskan oleh variabel lain.
2. Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Alokasi Umum secara bersama-sama/keseluruhan ataupun secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah provinsi Bengkulu.



3. Ada fenomena *Flypaper Effect* pada belanja daerah di provinsi Bengkulu dimana nilai koefisien dana alokasi umum yang lebih besar dibandingkan nilai koefisien pendapatan asli daerah.

## **SARAN**

1. Pemerintah provinsi Bengkulu diharapkan meningkatkan kemampuannya untuk lebih menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan dan belanja daerah.
2. Untuk meningkatkan kemandirian daerah sebaiknya ketergantungan terhadap bantuan pusat melalui penurunan Dana Alokasi Umum.
3. Untuk penelitian lebih lanjut agar dapat menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan/atau perbandingan daerah induk dengan daerah pemekaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, R. 2011. *Pembiayaan pembangunan daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afrizawati. 2012. *Analisis Flypaper Effect pada belanja daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS) , Vol. 2, No.1 .
- Ekawarna Shita Unjaswati. 2017. *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran) kabupaten/kota di provinsi jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 3.
- Halim Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kusumadewi, D.A., dan A. Rahman. 2007. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Pada Kabupaten / Kota di Indonesia*. JAAI 11(1): 67-80.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 26–28 Juli 2007.
- Mahmudi. 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi. Padang. 23 – 26 Agustus 2006.



- Ndadari, Laras Wulan, dan Priyo Hari Adi. 2008. *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat*. Makalah disampaikan dalam The 2nd National Conference UKWMS. Surabaya. 6 september 2008.
- Nabilah aisyah najibah. *analisis Flypaper Effect pad dan dau terhadap belanja Daerah di provinsi kalimantan timur tahun 2010-2014*.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pramuka, Bambang Agus. (2010). *Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.11 No.1 Juni 2010.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
- Rinaldi, U. 2012. *Kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah*. Jurnal EKSOS, Vol. 8, No.2 .
- Sugiyono. (2011) . *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suyanto, Joko Untung, Tri Widyastuti. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus terhadap Belanja Daerah dan Dana bagi hasil sebagai Pemoderasi pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa barat periode tahun 2010 – 2014.. <https://media.neliti.com/media/publications/54987-ID-pengaruh-pendapatan-asli-daerah-dana-alo.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. 15 Oktober 2004. *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004.15 Oktober 2004. *Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Widarjono Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia FE UII.



